

**PENGARUH LINGKUNGAN INSTITUSIONAL
DAN TIPE AUDITOR TERHADAP OPINI
AUDIT**

**(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN dan Non BUMN yang Terdaftar di
BEI Tahun 2009-2011)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**KARINA AWALIA ZAHRA
NIM. C2C009129**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Karina Awalia Zahra

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009129

Fakultas/ Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH LINGKUNGAN
INSTITUSIONAL DAN TIPE AUDITOR
TERHADAP OPINI AUDIT (Studi Empiris
pada Perusahaan BUMN dan Non BUMN
tahun 2009-2011)**

Dosen Pembimbing : **Anis Chariri, S.E., M Com., Ph D, Akt.**

Semarang, 3 Mei 2013

Dosen Pembimbing,

(Anis Chariri, S.E., M Com., Ph D, Akt.)

NIP. 196708091992031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Karina Awalia Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009129
Fakultas/ Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH LINGKUNGAN
INSTITUSIONAL DAN TIPE AUDITOR
TERHADAP OPINI AUDIT (Studi Empiris
pada Perusahaan BUMN dan Non BUMN
tahun 2009-2011)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22Mei 2013

Tim Penguji

1. Anis Chariri, S.E, M.Com., Ph.D., Akt (.....)
2. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D, Akt (.....)
3. Drs. H. Sudarno, M.Si, Ph.D, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Karina Awalia Zahra, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: PENGARUH LINGKUNGAN INSTITUSIONAL DAN TIPE AUDITOR TERHADAP OPINI AUDIT (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN dan Non BUMN tahun 2009-2011), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 3 Mei 2013

Yang membuat pernyataan,

(Karina Awalia Zahra)

NIM: C2C009129

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al- Insyirah: 5)

*“Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya; niat tidaklah cukup,
kita harus melakukannya”*

(Johann Wolfgang Von Goethe)

*“Imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Pengetahuan bersifat terbatas,
sedangkan imajinasi melingkupi jagat raya”*

“Bahkan, ilmu pasti pun tidak mutlak mempunyai kebenaran seratus persen”

(Albert Einstein)

*Skripsi ini aku persembahkan
teruntuk Ayah, Mama, Kamil, Ninis,
dan Kak Abra serta seluruh keluarga besar
dan sahabat-sahabat yang selalu mendukungku*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh lingkungan institusional dan tipe auditor terhadap opini audit. Lingkungan institusional dibedakan menjadi lingkungan institusional kuat (DKI Jakarta) dan lingkungan institusional lemah (Non DKI Jakarta). Tipe auditor dibedakan menjadi auditor lokal dan auditor non lokal. Opini audit dibedakan menjadi opini audit WTP dan Opini Audit Non WTP.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang menguji hubungan antarvariabel melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan 84 sampel pada 28 perusahaan selama tiga periode. Metode pengambilan sampel perusahaan BUMN menggunakan metode purposive sampling, sedangkan pengambilan sampel perusahaan non BUMN menggunakan metode random sampling. Teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa lingkungan institusional berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sedangkan, tipe auditor berpengaruh positif terhadap opini audit. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chan et.al. (2010) yang menemukan bahwa auditor lokal lebih mudah mengeluarkan opini WTP pada lingkungan institusional lemah dibandingkan dengan lingkungan institusional kuat, serta auditor lokal lebih mudah mengeluarkan opini WTP pada lingkungan institusional lemah dibandingkan dengan auditor non lokal.

Kata kunci: Opini audit, lingkungan institusional, tipe auditor, BUMN, non BUMN

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of the institutional environment and the type of auditor's audit opinion. Institutional environment can be divided into strong institutional environment (DKI Jakarta) and a weak institutional environment (Non DKI Jakarta). Type of auditor divided into local and non-local auditors. Audit opinion can be divided into an unqualified audit opinion and non unqualified audit.

The research method used is quantitative method that examined the relationship between variables through hypothesis testing using 84 samples in 28 companies during the three periods. The sampling method of SOEs using purposive sampling, whereas the sampling method of non-SOEs using random sampling methods. Hypothesis testing techniques performed using logistic regression analysis using SPSS.

The results obtained indicate that the institutional environment negatively affect the audit opinion. Meanwhile, positive effect on the type of auditor's audit opinion. This is consistent with a previous study conducted by Chan et al (2010) who found that local auditors more easily issued an unqualified opinion on the institutional environment is weak compared to the strong institutional environment, as well as local auditors more easily issued an unqualified opinion on the institutional environment is weak compared to the local auditor.

Keywords: Audit opinion, institutional environment, type of auditor, state-owned enterprises(SOEs) and non-owned enterprises(non-SOEs)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengaruh Lingkungan Institusional dan Tipe Auditor terhadap Opini Audit: Studi Empiris pada Perusahaan BUMN dan Perusahaan Non BUMN yang terdaftar di BEI.**

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. H. Sudarno, M.Si, Ph.D, Akt selaku dosen wali, terima kasih atas segala dukungan dan nasihat yang telah diberikan.
3. Bapak Anis Chariri, S.E, M.Com., Ph.D, Akt. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu di sela kesibukan, serta dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan, kepada penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D. dan Bapak Drs. H. Sudarno, M.Si, Ph.D., selaku dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengoreksi serta memberikan bimbingan dan masukan-masukan demi perbaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Seluruf jajaran staff dan pegawai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan kuliah.
7. Ayah dan Mama tercinta (H. Kaspinor S.E. dan Hj. Agustina S.E.) yang selalu memberi kasih sayang, perhatian, semangat, dan dorongan dalam menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S1. Terima Kasih atas segala pengorbanan dan do'a yang telah Ayah dan Mama berikan.
8. Adik-adikku tersayang, Kamil Ahsana Mudzakkir dan Kultsum Afifah Nisrina. Terima kasih karena selalu memberikan keceriaan dan semangat dalam kehidupan.
9. Kakakku tercinta Abra Puspa Ghani Talattov, S.E., yang senantiasa mencintai, menyayangi, mendampingi, dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan kuliah.
10. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah menjadi bagian terindah dalam hidupku: Dewi, Vina, Ria, Siska, Rosmi, Nibras, Tami, Ida, Saras, Eri, Siti, Rudi, Putra, Teguh, Galus, Ana, Dian, Willy, Alm. Wika, Chandra, Dinda, Siddik, Putu, Mita, Mbak Nina, Dek Umi, Mbak Rizka, Mbak Toky, Lea, Shuna, Furry, Faris, Mas Iqbal, dan Mas M Mujib.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi reguler 1 angkatan 2009 yang akan selalu menjadi teman terbaikku sampai kapanpun.

12. Teman-teman Lembaga Pers Mahasiswa Edents Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman berharga yang tidak akan pernah mampu terlupakan oleh penulis.
13. Teman-teman Peduli Duafa ROHIS Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, terima kasih karena telah mengajarkan penulis mengenai arti kepedulian terhadap sesama.
14. Teman-teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Januari 2013, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Terima kasih telah berbagi pengalaman ketika berbaur dan mengabdikan diri di masyarakat.
15. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan.

Semarang, 3 Mei 2013

(Karina Awalia Zahra)

NIM. C2C009129

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	9
2.1.1 Teori Institusional.....	9
2.1.2 Kepemilikan Pemetintah.....	11
2.1.3 Lingkungan Institusional.....	12
2.1.4 Tipe Auditor.....	14
2.1.5 Definisi BUMN dan BUMS.....	15
2.1.6 Opini Audit.....	18
2.1.7 Penelitian Terdahulu.....	22
2.2 Kerangka Pemikiran.....	24

2.3	Hipotesis.....	25
2.3.1	Pengaruh Lingkungan Institusional terhadap Opini Audit.....	25
2.3.2	Pengaruh Tipe Auditor terhadap Opini Audit.....	26
BAB III	METODE PENELITIAN.....	28
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	28
3.2	Populasi dan Sampel.....	32
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5	Metode Analisis.....	33
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	33
3.5.2	Logistic Regression.....	33
3.5.3	Uji Multikolonieritas.....	37
3.5.4	Matrik Klasifikasi.....	39
3.5.5	Variabel <i>Dummy</i>	39
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS.....	40
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	40
4.2	Analisis Data.....	41
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	41
4.2.2	Uji Hipotesis.....	45
4.2.2.1	Menilai Kelayakan Model Regresi.....	45
4.2.2.2	Menilai Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>).....	46
4.2.2.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	46
4.2.2.4	Uji Multikolonieritas (Matrik Korelasi).....	47
4.2.2.5	Matrik Klasifikasi.....	48
4.2.2.6	Uji Koefisien Regresi dan Uji Wald.....	49
4.3	Interpretasi Hasil.....	53
4.3.1	Pengaruh Lingkungan Institusional terhadap Opini Audit.....	53

4.3.2	Pengaruh Tipe Auditor terhadap Opini Audit.....	54
4.3.3	Pengaruh Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, <i>Return On Equity</i> , <i>Receivable-to-total-asset</i> , <i>Inventory-to- total-asset</i> , Tipe Perusahaan terhadap Opini Audit.....	58
BAB V	PENUTUP.....	62
5.1	Simpulan.....	62
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	63
5.3	Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel.....	40
Tabel 4.2 Rincian Tipe Perusahaan Berdasarkan Lokasi Perusahaan dan Lokasi Auditor.....	40
Tabel 4.3 Statistika Deskriptif.....	41
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi.....	42
Tabel 4.5 Matrik Korelasi.....	47
Tabel 4.6 Matrik Klasifikasi.....	48
Tabel 4.7 Nilai Beta dan Nilai Wald.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel.....	69
Lampiran 2 Data Sampel Penelitian.....	73
Lampiran 3 Hasil Output SPSS.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditing merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing penting untuk mengurangi risiko informasi antara dua pihak yang berkepentingan. Risiko informasi mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan merupakan informasi yang tidak akurat (Arens dan Loebbecke, 1991).

Hasil akhir dari proses audit adalah diterbitkannya laporan auditor independen/laporan audit. Menurut Budijono (2012), laporan audit adalah laporan yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Hal yang menarik pada opini audit adalah adanya pengaruh politik dalam pemberian opini audit oleh auditor kepada perusahaan klien, dimana sebagian besar perusahaan klien memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) (Budijono, 2012).

Dalam laporan audit, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan opini terbaik terhadap suatu entitas atas asersi (pernyataan) manajemen tentang laporan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Namun demikian,

perusahaan/entitas yang mendapatkan opini WTP bukan berarti entitas tersebut telah berkinerja baik, dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini disebabkan opini general audit yang diterbitkan akuntan bukan pemeriksaan dengan tujuan khusus, akan tetapi pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini (pendapat) wajar/layak atas laporan keuangan historis (Budijono, 2012).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi opini audit tersebut. Menurut Tantomo (2008), proses pengambilan keputusan dalam audit dipengaruhi oleh faktor keahlian dan independensi. Keahlian berkaitan dengan struktur pengetahuan yang dimiliki auditor, sedangkan independensi merupakan cerminan tekanan politik, sosial, dan ekonomi yang dihadapi seorang auditor dalam proses menentukan opini audit.

Selain itu, menurut Sari (2012), opini yang dikeluarkan auditor ini haruslah berkualitas yang ditunjukkan dengan semakin andal dan transparannya informasi keuangan perusahaan. Kualitas audit sering diproksikan dengan reputasi auditor. Sedangkan, menurut DeAngelo (1981), kualitas audit tidak terlepas dari ukuran perusahaan audit, pengalaman audit, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan serta kapabilitas dan independensi suatu perusahaan audit.

Menurut Andrey (2011), opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari auditor adalah salah satu jenis laporan auditor yang menyampaikan kabar buruk yang berhubungan dengan perusahaan. Jenis laporan ini dianggap sebagai peringatan kepada pengguna dan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan karena

merupakan satu-satunya keputusan yang dibuat oleh auditor yang obyektif diamati oleh publik.

Sementara itu, Chan, *et al.*(2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit adalah lingkungan institusional dan tipe auditor. Chan, *et al.* (2010) menemukan pada lingkungan institusional lemah, auditor lokal lebih mungkin—dibandingkan auditor non lokal—untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian pada perusahaan yang terdaftar dan dikendalikan oleh pemerintah lokal. Selain itu, dibandingkan dengan auditor lokal di lingkungan institusional yang kuat, auditor lokal yang berada pada lingkungan institusional lemah lebih mungkin untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk perusahaan tersebut.

Ekonomi, politik, lembaga, hukum, dan akuntansi adalah penentu utama pengembangan pasar uang, struktur kepemilikan perusahaan, dan sifat informasi akuntansi di seluruh dunia. Chan *et al.* (2010) menemukan bahwa auditor lokal cenderung untuk melaporkan opini WTP pada perusahaan BUMN perusahaan non BUMN pada lingkungan institusional lemah karena perekonomian lokal kemungkinan besar ditentukan oleh campur tangan politik dan pasar uang serta belum ditegakkannya hukum secara adil.

Tipe auditor yang didefinisikan sebagai auditor lokal adalah jika auditor terletak di provinsi yang sama dengan klien dan perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan BUMN adalah jika pemegang saham terbesar pada perusahaan tersebut adalah pemerintah yang memiliki setidaknya 50 persen dari saham yang beredar (Chan, *et al.*, 2010). Sementara itu, Chan *et al.* (2006) mendefinisikan

auditor menjadi auditor lokal jika terletak di provinsi yang sama dengan klien, dan lebih dari 50 persen dari total aset klien dimiliki oleh klien yang berlokasi di provinsi yang sama dengan auditor.

Ada beberapa kasus audit yang berkaitan dengan opini WTP yang diberikan oleh akuntan publik independen misalnya kasus *Enron Corporation*. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku *moral hazard* diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Enron sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh kantor akuntan Arthur Anderson, salah satu kantor akuntan publik (KAP) *big four*, namun secara mengejutkan pada 2 Desember 2001 dinyatakan pailit. Penyebab kepailitan tersebut salah satunya karena Arthur Anderson memberikan dua jasa sekaligus, yaitu sebagai auditor dan konsultan bisnis (Kusmayadi, 2009).

Di Indonesia, kasus yang berkaitan dengan audit adalah kasus PT Kimia Farma dan PT Telkom. Sama seperti kasus Enron, kasus PT Kimia Farma berawal dari terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan. Begitu pula dengan kasus PT Telekomunikasi Indonesia dengan potensi penyimpangan anggaran yang merugikan negara mencapai Rp12 milyar dan US\$ 130 Juta (Tempo, 16 Juli 2012).

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kembali pengaruh lingkungan institusional dan tipe auditor terhadap pemberian opini audit oleh auditor. Sejalan dengan argumen Chan *et al.* (2010) lingkungan institusional didefinisikan sebagai lokasi perusahaan, yaitu jika perusahaan memiliki *head office* yang

berlokasi masih di wilayah Ibu Kota artinya lingkungan institusionalnya kuat, dan sebaliknya jika perusahaan berada di selain wilayah ibu kota artinya lingkungan institusionalnya lemah. Peneliti menggunakan DKI Jakarta dan non DKI Jakarta sebagai ukuran lingkungan institusional karena berdasarkan intervensi birokrasi yang ada di Indonesia lebih kuat karena ibu kota Jakarta merupakan pusat birokrasi (perizinan), bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian, tipe auditor didefinisikan sebagai lokasi auditor yaitu jika perusahaan audit berada di wilayah yang sama dengan *head office auditee*, maka auditor didefinisikan sebagai auditor lokal, dan sebaliknya jika auditor berada di wilayah yang berbeda dengan *head office auditee*, maka auditor didefinisikan sebagai auditor non lokal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Chan *et al.* (2010) yang dilakukan di China. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal populasi, sampel, dan reputasi auditor. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu menggunakan populasi dan sampel dari perusahaan BUMN dan perusahaan non BUMN yang terdaftar di Bursa Efek China, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya, dalam hal reputasi auditor, penelitian sebelumnya menggunakan *top 10* sebagai ukuran reputasi auditor, sedangkan penelitian ini menggunakan istilah *big 4* sebagai ukuran reputasi auditor.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berupaya untuk menguji kembali penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya pada *setting* lingkungan institusional yang berbeda untuk menganalisis apakah lingkungan institusional dan tipe auditor berpengaruh terhadap opini audit yang diterima oleh perusahaan BUMN dan perusahaan non BUMN. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah lingkungan institusional dan tipe auditor berpengaruh terhadap opini audit perusahaan non BUMN. Chan *et al.* (2010) menyatakan bahwa pada lingkungan institusional lemah, auditor lokal dibandingkan auditor non lokal lebih mudah untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Selain itu, dibandingkan dengan auditor lokal di lingkungan institusional yang kuat, auditor lokal di lingkungan institusional lemah lebih mudah untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk perusahaan tersebut.

Adanya anggapan bahwa opini audit wajar tanpa pengecualian merupakan opini terbaik yang didapatkan oleh perusahaan, dan sebaliknya, opini wajar dengan pengecualian adalah salah satu jenis laporan auditor yang menyampaikan kabar buruk yang berhubungan dengan perusahaan (Chan *et al.*, 2005 dalam Andrey, 2011), menjadikan opini audit merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan demi terciptanya citra positif bagi perusahaan. Namun demikian, di Indonesia belum ada riset yang mencoba mengaitkan lingkungan institusional dan tipe auditor dengan opini audit.

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah auditor lokal pada lingkungan institusional yang lemah lebih mudah mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian pada perusahaan BUMN dan perusahaan non BUMN, dibandingkan dengan auditor lokal pada lingkungan insititusal yang kuat ?
- b. Apakah auditor lokal pada lingkungan institusional yang lemah lebih mudah mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian pada perusahaan BUMN dan perusahaan non BUMN, dibandingkan dengan auditor non lokal pada lingkungan institusional yang lemah ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris tentang pengaruh lingkungan institusional dan tipe auditor terhadap opini audit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) di Indonesia. Adapun kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan praktik auditing di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Usulan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan urutan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan

kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian akhir bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel dan definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tiga bagian; pertama merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis; kedua adalah keterbatasan dalam penelitian ketiga adalah saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Institusional

Ide pokok teori institusional adalah bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya (Gudono, 2009 dalam Rejeki, 2012). Menurut Teori institusional, perilaku organisasi atau keputusan yang diambil organisasi dipengaruhi oleh institusi di luar organisasi. DiMaggio dan Powell (1983) mengatakan bahwa, organisasi akan berupaya untuk menyesuaikan diri atau *isomorphic* (sama dalam tampilan tetapi berbeda didalamnya) akibat tekanan dari luar jika ingin bertahan hidup. Menurut Meyer dan Rowan (1977), banyak posisi, kebijakan, program, dan prosedur organisasi modern dipengaruhi oleh opini publik, pandangan konstituen, dan pengetahuan melalui sistem pendidikan, prestis sosial, hukum, dan pengadilan.

Ada tiga proses bagaimana organisasi menyesuaikan diri. Pertama, *coersive isomorphism* yaitu proses penyesuaian menuju kesamaan dengan “pemaksaan”. Tekanan datang dari pengaruh politik dan masalah legitimasi. Misalnya, tekanan muncul karena peraturan pemerintah yang memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Begitu pula dalam sebuah perusahaan milik negara atau BUMN. BUMN yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh negara mendapatkan tekanan untuk meningkatkan prestis sosial. BUMN secara tidak langsung diharuskan memberikan pelayanan yang maksimal karena berada di bawah

pengawasan pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang kompeten dalam urusan negara dianggap lebih mampu mengawasi jalannya suatu usaha yang nantinya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat juga. Dengan adanya paksaan dan tekanan, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada BUMN maupun BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam proses menyesuaikan diri ini, ketika perusahaan milik negara (BUMN) berhadapan dengan perusahaan lain (BUMD) yang mungkin lebih berkuasa, pemerintah selaku pemegang saham terbesar BUMN bisa jadi merasa berada dalam tekanan publik, sehingga pihak pemerintah akan berupaya lebih birokratis agar memenuhi tuntutan masyarakat. Di mana hal ini lebih mengarah kepada prestis sosial/ memunculkan citra positif bagi BUMN dan juga pemerintah itu sendiri. Namun, jika BUMN tidak berhasil meningkatkan prestis, maka citra pemerintah akan dinilai buruk di mata masyarakat.

Kedua, *mimetic isomorphism* yaitu proses di mana organisasi meniru organisasi lain yang berhasil dalam satu bidang, meskipun organisasi peniru tidak tahu persis mengapa mereka meniru, bukan karena dorongan supaya lebih efisien. Menurut DiMaggio dan Powell (1983), biasanya proses peniruan ini muncul di lingkungan yang tidak pasti. Sebagai contoh, manajemen perusahaan Jepang banyak ditiru oleh perusahaan dari negara lainnya karena dianggap berhasil.

Ketiga, *normative isomorphism* sering diasosiasikan dengan profesionalisasi dan menangkap tekanan normatif yang muncul di bidang tertentu. Norma atau sesuatu yang tepat bagi organisasi berasal dari pendidikan formal dan

sosialisasi pengetahuan formal itu di bidang tertentu yang menyokong dan menyebarkan kepercayaan normatif itu. Ketika profesionalisme meningkat maka meningkat juga tekanan normatif itu.

Teori institusional atau teori kelembagaan organisasi relevan untuk riset ini karena penelitian ini mengarahi bagaimana perilaku auditor dipengaruhi oleh kekuatan budaya, politik, dan sosial sekitar organisasi. Selain itu, menurut Zucker (1987) organisasi dipengaruhi oleh tekanan normatif yang timbul dari sumber eksternal dan organisasi itu sendiri. Tekanan normatif tersebut bisa muncul dari kekuatan hukum atau intervensi pemerintah. Di mana pemerintah yang memiliki saham terbesar di perusahaan BUMN memiliki keleluasaan dalam memilih/menentukan auditor yang akan mengaudit perusahaan tersebut.

Menurut DiMaggio dan Powell (1983), lingkungan institusional dalam teori institusional didefinisikan sebagai kolaborasi antara nilai-nilai sosial dan budaya yang harus dipenuhi agar organisasi dapat memperoleh legitimasi untuk dapat bertahan. Oleh karena itu, dalam menganalisis lingkungan organisasi, maka fokusnya perlu melibatkan pihak-pihak yang melakukan pertukaran secara institusi (misal badan pembuat undang-undang, organisasi politik dan sosial, organisasi profesi, dan sebagainya) (Anjasmoro, 2010).

2.1.2 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan negara terhadap saham perusahaan, sering disebut kepemilikan pemerintah atau milik negara, bukan individu atau masyarakat. Menurut Sinaga (2012), kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan

yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah dapat memilih direktur perusahaan yang nantinya akan diberikan kewenangan untuk memimpin perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan/aspirasi pemerintah.

Kepemilikan saham oleh pemerintah suatu negara umumnya terdapat pada perusahaan milik negara yang disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga *stakeholder* utama perusahaan ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, BUMN berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepemilikan pemerintah terhadap BUMN diukur dengan persentase lebih dari 50 persen.

2.1.3 Lingkungan Institusional

Lingkungan institusional diproksikan dengan lokasi perusahaan, yaitu jika perusahaan berada di wilayah ibu kota artinya lingkungan institusionalnya kuat, dan sebaliknya jika perusahaan berada di wilayah selain ibu kota artinya lingkungan institusionalnya lemah. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chan *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa lingkungan institusional kuat terletak di Beijing yang merupakan ibu kota China. Secara geografis, Beijing berada di wilayah timur China. Sedangkan, lingkungan institusional lemah terletak di wilayah non Ibu kota yaitu Shanghai, Ghuangzou, Shenzhen, Dalian, dan Chongqing yang secara geografis berada di wilayah barat China.

Di Indonesia, terdapat istilah wilayah pembangunan barat wilayah pembangunan timur. Namun, dalam penelitian ini lebih menggunakan konteks DKI Jakarta (Ibu Kota) dan non DKI Jakarta (non Ibu Kota) sebagai pembeda lingkungan institusional sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan, Ibu Kota Indonesia adalah DKI Jakarta yang terletak di wilayah barat, maka lingkungan institusional kuat diproksikan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan, lingkungan institusional lemah diproksikan dengan wilayah Indonesia bagian non barat yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Walaupun Jawa Barat berada di wilayah Indonesia bagian barat, tetapi Jawa Barat bukan merupakan wilayah Ibu Kota. Oleh karena itu, Jawa Barat tidak dikategorikan sebagai wilayah barat melainkan wilayah non barat.

Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat bisnis dan keuangan. Di samping Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, kantor-kantor pusat perusahaan nasional banyak berlokasi di Jakarta. Saat ini, lebih dari 70 persen uang negara, beredar di Jakarta. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi atau pembangunan yang ada di negara lain seperti Amerika Serikat, Malaysia, dan China.

Di Amerika Serikat, pusat bisnis berada di New York dan pusat pemerintahan berada di Washington DC. Begitu pula dengan Malaysia, di mana pusat pemerintahan Malaysia yang semula berada di Kuala Lumpur, kini resmi dipindahkan ke Putra Jaya, sehingga pusat bisnis dan pusat pemerintahan di Malaysia terpisah. Selain itu, China juga memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. Beijing, Ibu kota China merupakan pusat pemerintahan dan 5 kota

besar lainnya yaitu Shanghai, Ghuangzou, Shenzhen, Dalian, dan Chongqing merupakan pusat bisnis dan perekonomian. Namun, tidak demikian dengan Indonesia. Pusat bisnis dan pusat pemerintahan menjadi satu yaitu berada di Ibukota Jakarta.

Pada perusahaan yang berada di lingkungan institusional yang tidak tetap/berpindah-pindah, kolusi audit kemungkinan akan terjadi. Kolusi tersebut paling mungkin terjadi antara BUMN lokal dan auditor lokal di lingkungan institusional lemah, karena kedua kelompok memiliki hubungan yang dekat dengan kepentingan umum pemegang saham (Chan *et al.*, 2010).

Menurut Baiman *et al.* (1991) dalam Chan *et al.*(2010), saat kolusi terjadi, pihak yang berkolusi harus memiliki kepentingan kesamaan, dan biaya kolusi harus rendah. Di satu sisi, BUMN lokal memiliki insentif untuk menyewa auditor lokal (karena kekuasaan politik pemerintah atas auditor) untuk memfasilitasi penawaran publik selanjutnya (Aharony (2002) dalam Chan *et al.* (2010)). Di sisi lain, auditor lokal yang rentan politik memiliki insentif untuk berkolusi dengan pemerintah yang dikuasai oleh perusahaan BUMN karena adanya ketergantungan ekonomi yang signifikan antara auditor dengan pemerintah (Chan *et al.*, 2006).

2.1.4 Tipe Auditor

Tipe auditor dibedakan menjadi auditor lokal dan auditor non-lokal. Auditor lokal didefinisikan sebagai auditor yang berada pada provinsi yang sama dengan klien, sedangkan definisi auditor non-lokal adalah sebaliknya (Chan, *et al.*, 2006). Menurut Chan *et al.* (2006), auditor lokal yang rentan politik memiliki

insentif untuk melaporkan pendapat wajar tanpa pengecualian pada BUMN lokal. Chan *et al.* (2010) menemukan bahwa kombinasi dari auditor lokal, kepemilikan pemerintah, dan lingkungan institusional yang lemah mengakibatkan laporan auditor lebih lunak. Sementara itu, Wang *et al.*, (2008) menemukan bahwa perusahaan BUMN lebih mungkin menyewa auditor lokal dibandingkan perusahaan Non BUMN pada lingkungan institusional lemah.

2.1.5 Definisi BUMN dan BUMS

2.1.5.1 Definisi BUMN

Menurut UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara Pasal 1, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Perusahaan publik merupakan suatu perusahaan yang mempublikasikan segala informasi tentang laporan keuangan perusahaan kepada publik atau kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat atau pihak eksternal perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan perusahaan publik tersebut (Shinta dan Ahmar, 2011). Perusahaan diklasifikasikan sebagai BUMN lokal jika pemegang saham terbesar adalah pemerintah yang memiliki setidaknya 50 persen dari saham yang beredar (Chan *et al.*, 2006).

BUMN merupakan perusahaan milik negara yang diaudit oleh dua badan auditor yaitu auditor pemerintah dan auditor swasta. Auditor pemerintah yang melakukan audit terhadap BUMN adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,

sedangkan auditor swasta yang juga melakukan audit terhadap BUMN adalah akuntan publik yang bekerja dalam kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia (Kompas, 18 Desember 2012).

Menurut Kholil (2006), direksi BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairnes*), yaitu keadilan dan kesetaran di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian, dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku (Ruru, 2001; Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M.MBU/2002, pasal 3).

2.1.5.2 Definisi BUMS

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandakan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan. Kebijakan pemerintah ditempuh dengan beberapa pertimbangan berikut ini.

- a. Menumbuhkan daya kreasi dan partisipasi masyarakat dalam usaha mencapai kemakmuran sesuai dengan cita-cita bangsa.
- b. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh pemerintah untuk menggali dan mengolah sumber daya alam sehingga memerlukan dorongan usaha swasta.
- c. Memberi kesempatan agar perusahaan-perusahaan swasta dapat memperluas kesempatan kerja.

- d. Mencukupi kebutuhan akan tenaga ahli dalam menggali dan mengolah sumber daya alam.

2.1.6 Opini Audit

Dalam melakukan penugasan umum, auditor memiliki tugas untuk memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, sehingga opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit (SPAP, 2004 Alinea 1).

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberi pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (SPAP, 2001 Alinea 1).

Opini audit menurut Mulyadi (2002) terdiri atas lima jenis, yaitu:

- 1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan

audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien; pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor.

Kata wajar dalam paragraf pendapat mempunyai makna: (1) bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran, (2) lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah rupiah dari pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan, namun meliputi pula ketepatan penggolongan informasi, seperti penggolongan aktiva atau utang ke dalam kelompok lancar dan tidak lancar, biaya usaha dan biaya di luar usaha.

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Jika memenuhi kondisi berikut ini.

- a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
 - b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.
 - c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- 2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory Language*)

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha

perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku dengan bahasa penjelasan.

3) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini, maka ia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian laporan audit.

1. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
3. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
4. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak diterapkan secara konsisten.
5. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika dalam auditnya auditor menemukan salah satu dari kondisi 1 sampai dengan 4 tersebut diatas. Pendapat ini hanya diberikan secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar. Dalam pendapat ini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

4) Pendapat tidak wajar (*advers opinion*)

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia dibatasi ruang lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5) Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah:

1. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit
2. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) adalah: pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*no opinion*) karena ia

tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Chan, et al (2006) menemukan bahwa auditor lokal yang memiliki ketergantungan ekonomi lebih pada klien lokal dan tunduk pada pengaruh politik yang besar dari pemerintah lokal dibandingkan auditor non lokal, cenderung lebih mudah melaporkan laporan audit dengan opini *clean* pada BUMN lokal untuk mengurangi kemungkinan kerugian ekonomi. Selain itu, perusahaan dengan pendapat wajar dengan pengecualian lebih cenderung beralih dari auditor non lokal ke auditor lokal daripada perusahaan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Chan *et al.* (2006) juga menemukan bahwa dalam lingkungan politik, BUMN yang beralih dari auditor non lokal ke auditor lokal setelah menerima pendapat wajar dengan pengecualian dapat berhasil meningkatkan pendapatan belanja.

Wang, *et al.* (2008) menemukan bahwa dibandingkan perusahaan non BUMN, perusahaan BUMN lokal (BUMD) lebih mungkin untuk menyewa auditor kecil (*non-big4*) dalam wilayah yang sama. Pada lingkungan institusional yang lemah, BUMN dikendalikan oleh pemerintah pusat (BUMN pusat) juga memiliki kecenderungan itu. Namun, kecendrungan BUMN pusat dan daerah untuk menyewa auditor lokal kecil (*non big 4*) pada lingkungan insitusional lemah. Pola pilihan auditor cenderung dijelaskan oleh ‘kurangnya permintaan

BUMN untuk auditor besar (*big 4*) atau auditor non lokal, disebabkan adanya insentif untuk berkolusi dengan auditor kecil (*non big 4*) atau auditor lokal’.

Chan *et al.* (2010) menemukan bahwa pada lingkungan dengan lingkungan institusional lemah, auditor lokal lebih mungkin dibandingkan auditor non lokal untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian pada perusahaan yang terdaftar dikendalikan oleh pemerintah lokal. Selain itu, dibandingkan dengan auditor lokal di lingkungan institusional yang kuat, auditor lokal di lingkungan institusional lemah lebih mudah untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk perusahaan tersebut. Selain itu, Chan *et al.* (2010) juga menemukan bahwa perusahaan pada lingkungan institusional lemah yang beralih ke auditor lokal setelah menerima pendapat wajar dapat berhasil dalam pendapatan belanja.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

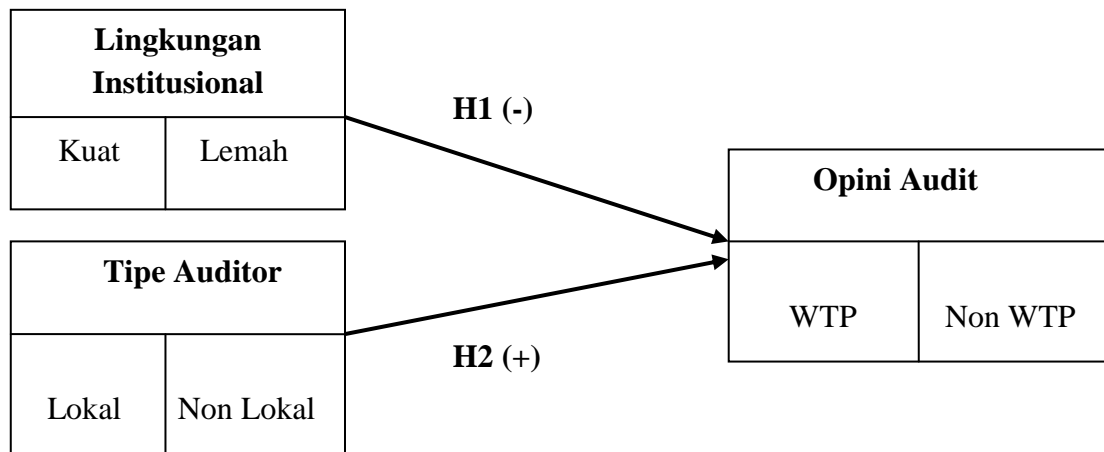
No.	Peneliti (Tahun)	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Chan, <i>et al.</i> (2006)	Metode Kuantitatif, Logistic Regression.	Dependen: Opini <i>Clean</i> Independen: Auditor Non Lokal	Auditor lokal dibandingkan auditor non lokal, cenderung melaporkan laporan audit dengan opini <i>clean</i> pada BUMN lokal untuk mengurangi kemungkinan kerugian ekonomi
2.	Wang <i>et al.</i> (2008)	Kuantitatif, Logistic Regression.	Dependen: Pilihan Auditor Independen: Kepemilikan Pemerintah	Dibandingkan Non-BUMN, BUMN lokal lebih mungkin untuk menyewa auditor kecil dalam wilayah yang sama (auditor lokal kecil)
3.	Chan <i>et al.</i> (2010)	Kuantitatif, Logistic Regression.	Dependen: Opini audit Independen: Tipe Auditor, Lingkungan Institusional, <i>Switch</i> Auditor.	Ketika lingkungan institusional lemah, auditor lokal lebih mungkin dibandingkan non-lokal auditor untuk mengeluarkan pendapat WTP pada BUMN lokal.

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji pengaruh lingkungan institusional dan tipe auditor terhadap opini audit. Kepemilikan pemerintah dilihat berdasarkan status perusahaan, dimana perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah lebih dari 50 persen adalah perusahaan negara (BUMN), sedangkan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh individu, badan, atau asing lebih dari 50 persen adalah perusahaan swasta (BUMS). BUMN yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh negara maka akan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap publik. Namun, BUMN juga memiliki wewenang dalam menentukan auditor yang akan digunakan jasanya. Seharusnya, BUMN tidak diperkenankan memilih auditor sendiri, karena hal tersebut akan menyebabkan kecurangan dengan memilih auditor berdasarkan kualitas perusahaan audit. Jika perusahaan audit berkualitas buruk, maka buruklah kinerjanya, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil audit. Dengan memilih auditor yang berada pada lokasi atau wilayah yang sama dengan BUMN, maka BUMN akan dengan mudahnya melakukan kolusi untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Apalagi, jika ditambah dengan kondisi wilayah BUMN yang berada pada lingkungan institusional yang lemah dengan birokrasi dan hukum yang lemah pula, maka akan semakin mempermudah ruang gerak para pelaku kolusi antara BUMN dengan Auditor.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Dikembangkan untuk penelitian

2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Lingkungan Institusional terhadap Opini Audit

Teori insititusional mengatakan bahwa perusahaan merupakan entitas terbuka yang sangat ditentukan oleh lingkungan institusinya. Lingkungan Institusional dibedakan menjadi lingkungan institusional lemah dan lingkungan institusional kuat. Chan *et al.* (2010) menemukan bahwa dibandingkan dengan auditor lokal di lingkungan institusional yang kuat, auditor lokal yang berada di lingkungan institusional yang lemah lebih mungkin untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk perusahaan tersebut.

Lingkungan Institusional diduga berpengaruh negatif terhadap opini audit. Jika BUMN berada pada lingkungan institusional lemah, artinya lingkungan hukumnya juga akan lemah, maka perusahaan akan

leluasa memilih auditor mana yang lebih mudah memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Sebaliknya, BUMN yang berada pada lingkungan institusional kuat, artinya lingkungan hukumnya juga akan kuat, sehingga akan mempersempit ruang gerak BUMN untuk memilih auditor mana yang berpeluang akan menguntungkan perusahaan dengan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1 : Auditor lokal pada lingkungan institusional lemah lebih mudah mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian kepada perusahaan BUMN dan perusahaan non BUMN, dibandingkan dengan auditor lokal pada lingkungan insititusal yang kuat.

2.3.2 Pengaruh Tipe Auditor terhadap Opini Audit

Tipe auditor dibedakan menjadi auditor lokal dan auditor non-lokal. Chan *et al.* (2006) menemukan bahwa auditor lokal yang memiliki ketergantungan ekonomi lebih pada klien lokal dan tunduk pada pengaruh politik yang lebih dari pemerintah lokal dibandingkan auditor non lokal, cenderung melaporkan laporan audit dengan opini *clean* pada BUMN lokal untuk mengurangi kemungkinan kerugian ekonomi.

Wang, *et al* (2008) menemukan bahwa dibandingkan Non BUMN, BUMN lokal lebih mungkin untuk menyewa auditor lokal dibandingkan menyewa auditor non lokal pada lingkungan institusional yang lemah. Chan *et al.* (2010) menemukan bahwa pada lingkungan institusional

lemah, dibandingkan dengan auditor non lokal, auditor lokal lebih mudah untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian pada perusahaan yang terdaftar dikendalikan oleh pemerintah lokal.

Tipe auditor diduga berpengaruh positif terhadap opini audit. Jika BUMN menggunakan jasa auditor lokal, maka kemungkinan kolusi akan semakin besar. Konsekuensinya, kemungkinan BUMN akan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian akan semakin besar. Sebaliknya, jika BUMN menggunakan jasa auditor non lokal, maka kemungkinan kolusi akan semakin kecil. Konsekuensi logis dari kondisi ini adalah bahwa kemungkinan BUMN akan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian akan semakin kecil. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H2: Auditor lokal pada lingkungan institusional lemah lebih mudah mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian pada perusahaan BUMN dan perusahaan non BUMN, dibandingkan dengan auditor non lokal pada lingkungan institusional yang lemah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan opini audit wajar tanpa pengecualian sebagai variabel dependen, sedangkan sebagai variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan pemerintah dan lingkungan institusional.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, variabel opini audit (OP) merupakan variabel dependen dan merupakan ukuran opini audit wajar tanpa pengecualian. Variabel ini merupakan variabel dummy dengan kategorinya adalah masuk kategori 1 jika perusahaan menerima laporan audit berisi opini WTP, dan masuk kategori 0 jika perusahaan menerima laporan audit berisi opini non WTP.

3.1.1.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen yaitu sebagai berikut.

1. Lingkungan Institutional (INST)

Variabel lingkungan Institutional merupakan variabel independen yang mempengaruhi hasil audit. Lingkungan Insitusional dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan institusional lemah dan lingkungan institusional

kuat. Lingkungan institusional lemah diperjelas lagi menjadi wilayah non DKI Jakarta, dan lingkungan institusional kuat diperjelas menjadi wilayah DKI Jakarta. Wilayah DKI Jakarta dikatakan kuat karena Jakarta merupakan pusat birokrasi maupun pusat bisnis. Sedangkan, wilayah non DKI Jakarta merupakan wilayah selain DKI Jakarta. Variabel ini merupakan variabel *dummy* dengan kategorinya adalah masuk kategori 1 jika lingkungan institusional kuat, dan sebaliknya masuk kategori 0 jika lingkungan institusional lemah.

2. Tipe Auditor (Local)

Auditor lokal adalah auditor yang berada dalam wilayah yang sama dengan klien (BUMN). Auditor lokal merupakan ukuran tipe auditor yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dengan kategorinya adalah masuk kategori 1 jika perusahaan menyewa auditor lokal, dan masuk kategori 0 jika perusahaan menyewa auditor non lokal.

3.1.1.3 Variabel Kontrol/ Variabel *Control*

Variabel *control* adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel *control* sering dipakai dalam penelitian yang bersifat membandingkan, melalui penelitian eksperimental (Anshari, 2012).

Variabel kontrol dalam penelitian ini antara lain:

1. Reputasi Auditor (*Big 4*)

Reputasi auditor ditunjukkan oleh kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4)*. Variabel ini merupakan variabel dummy dengan kategorinya adalah 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four*, dan 0 jika perusahaan bukan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four*. Kategori KAP *big four* di Indonesia, terdiri dari: KAP Price Waterhouse Coopers, KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler, KAP Ernest and Young, KAP Deloitte Touche Thomatsu.

2. Ukuran Perusahaan Klien (*Size*)

Ukuran perusahaan dapat diukur dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu (Sulistyo, 2010). Dalam penelitian ini, variabel *size* diukur dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$Size = \text{Log} (\text{Total Aset})$$

3. Return On Equity (*ROE*)

Return On Equity (ROE) disebut juga dengan laba atas *equity*. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio total asset turnover atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Fahmi, 2011). *ROE* membandingkan laba bersih setelah pajak (dikurangi dividen saham biasa dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham di perusahaan (Horne dan Wachowicz JR., 2009). Adapun rumus *return on equity (ROE)* adalah:

$$ROE = \frac{Net\ Income}{Owner's\ Equity}$$

4. *Ratio of Receivables to Total Asset (RECV)*

Ratio of Receivables to Total Asset/ Receivables-to-Total-Asset Ratio merupakan persentase piutang terhadap asset lancar. Adapun rumus *Receivables-to-Total-Asset Ratio* adalah

$$RECV = \frac{Receivables}{Total\ Asset}$$

5. *Ratio of Inventory to Total Asset (INV)*: Inventory-to-total asset ratio

Ratio of Inventory to Total Asset merupakan persentase persediaan terhadap total asset. Adapun rumus INV adalah sebagai berikut.

$$INV = \frac{Inventory}{Total\ Asset}$$

6. Tipe Perusahaan/ BUMN (LocSOE)

LocSOE merupakan variabel dummy dengan kategorinya adalah masuk kategori 1 jika pemegang saham pengendali utamanya adalah pemerintah, dan masuk kategori 0 jika tidak.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011. Pengambilan sampel perusahaan BUMN dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sedangkan untuk pengambilan sampel perusahaan non BUMN menggunakan metode *random sampling* dengan berdasarkan pada kemudahan mendapatkan laporan keuangan melalui internet.

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel perusahaan BUMN adalah:

1. Perusahaan BUMN yang listing di BEI Tahun 2009-2011
2. Perusahaan BUMN merupakan perusahaan non keuangan

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang terkait dalam penelitian ini berasal dari data sekunder perusahaan periode 2009-2011 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses pada website www.idx.com.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari berbagai literatur yang berkaitan baik berupa catatan-catatan, dokumen, artikel, laporan keuangan, laporan auditan, dan annual report perusahaan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Fungsi dari analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang diperoleh.

3.5.2 *Logistic Regression*

Logistic regression mirip dengan analisis diskriminan yaitu menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Regresi logistik juga sama dengan analisis regresi berganda, hanya variabel terikatnya merupakan variabel *dummy* (0 dan 1). Regresi logistik (kadang disebut model logistik atau model logit) merupakan salah satu bagian dari Analisis regresi, yang digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa, dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Metode ini

merupakan model linear umum yang digunakan untuk regresi binomial. Seperti analisis regresi pada umumnya, metode ini menggunakan beberapa variabel bebas, baik numerik maupun kategori.

Regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, dikarenakan variabel terikat yang terdapat pada regresi logistik merupakan variabel *dummy* (0 dan 1), sehingga residualnya, tidak memerlukan ketiga pengujian tersebut. Untuk asumsi multikolinearitas, karena hanya melibatkan variabel-variabel bebas, maka masih perlu untuk dilakukan pengujian (Hasmer, 2011).

Persamaan Regresinya adalah sebagai berikut.

REGRESI HIPOTESIS 1

$$OP1 = \beta_0 + \beta_1 INST + \beta_2 Big4 + \beta_3 Size + \beta_4 ROE + \beta_5 RECV + \beta_6 INV + \beta_7 LocSOE + \alpha_{12-22} Industry + \alpha_{23-33} Year + e.$$

REGRESI HIPOTESIS 2

$$OP 2 = \beta_0 + \beta_1 Local + \beta_2 Big4 + \beta_3 Size + \beta_4 ROE + \beta_5 RECV + \beta_6 INV + \beta_7 LocSOE + \alpha_{12-22} Industry + \alpha_{23-33} Year + e.$$

Keterangan:

- a. OP: Opinion (Variabel *dummy*; Unqualified= 1, Non unqualified = 0)
- b. INST: Lingkungan Insitusal (Variabel *Dummy*; kuat=1, lemah= 0)
- c. Local: Tipe Auditor (Variabel *Dummy*; Auditor lokal = 1, Auditor non lokal= 0)
- d. *Big 4*: Reputasi Auditor (Variabel *Dummy*, *Big 4*=1, bukan= 0)
- e. *Size*: Ukuran Perusahaan Klien (total asset)

- f. *ROE: Return On Equity (Net income ÷ owner's equity)*
- g. *RECV: Receivables-to-total-asset ratio*
- h. *INV: Inventory-to-total asset ratio*
- i. *LocSOE: Variabel dummy; 1= pemegang saham pengendali utamanya adalah pemerintah, 0= pemegang saham pengendali utamanya adalah swasta.*

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Analisis:

- a. Menilai Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi logistik yang akan digunakan. Pengujian kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan *Goodness of fit test* yang diukur dengan nilai Chi-Square pada tabel *Hosmer and Lemeshow*. Beberapa test statistik diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H₀ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data maka H₀ harus diterima. *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menguji hipotesa nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak berarti ada perbedaan

signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit model* tidak baik karena tidak dapat memprediksikan nilai observasinya. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol di terima dan berarti model memprediksikan nilai observasinya atau dikatakan model dapat diterima karena fit atau cocok dengan data observasinya.

b. Menilai Keseluruhan Model (Overall Mode Fit)

Langkah berikutnya adalah menguji keseluruhan model regresi (*overall model fit*). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2 Log Likelihood (-2LL)* pada awal (*Block Number= 0*) dengan nilai *-2 Log Likelihood (-2LL)* pada akhir (*Block Number= 1*). Adanya pengurangan nilai antara *-2LogL* awal dengan nilai *-2LogL* pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2006). *Log likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian “*Sum of Square Error*” pada model regresi, sehingga penurunan model *log Likelihood* menunjukkan model regresi yang semakin baik.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen. *Cox* dan *Snell's R Square* merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R^2 pada model *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan.

Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai *Nagelkerke R Square*. *Nagelkerke's R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox* dan *Snell* untuk memastikan bahwa nilai bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). *Nagelkerke* bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.

d. Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Estimasi parameter dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sig.). apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat.

3.5.3 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen yang nilai korelasi sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90). Maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakan yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karna $VIF = 1 / \text{Tolerance}$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai

$Tolerance \leq 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai $tolerance = 0.10$ sama dengan tingkat kolonieritas 0.95. walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai $Tolerance$ dan VIF , tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkorelasi.

3.5.4 Matrik Klasifikasi (Tabel Klasifikasi)

Tabel klasifikasi (*Classification Table*) digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan yang salah (*incorrect*). Pada kolom merupakan nilai prediksi dari variabel dependen, sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan 100%.

3.5.5 Variabel Dummy

Permasalahan yang sering dihadapi adalah adanya variabel independen yang berskala ukuran non-metrik atau kategori. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel *dummy* dengan memberikan kode 0 (nol) atau 1 (satu) (Ghozali, 2006).